

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

a. Ekonomi Mikro

Ekonomi mikro mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi. Ekonomi mikro menjelaskan *how* dan *why* sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi . Pembahasan ekonomi mikro konvensional didasarkan pada perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi, karena tidak adanya batasan syariah yang digunakan, maka perilaku dari setiap individu dalam unit ekonomi tersebut akan bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma dan aturan menurut persepsi masing-masing.

Teori ekonomi juga dapat berfungsi untuk memprediksi dampak dengan adanya perubahan satu variabel terhadap variabel lainnya. Teori mikro ekonomi dapat menerangkan tentang peningkatan dan penurunan output sebagai dampak dari adanya kenaikan dan penurunan pada variabel ekonomi lain, seperti tingkat upah, inflasi dan jumlah permintaan.¹⁵

Ekonomi Islam sebagai suatu Ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian ilmiah yang panjang, dimana pada awalnya terjadi sikap pesimis terkait eksistensi Ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini,

¹⁵Ir. Adiwirman A. karim, S.E, M.B.A., M.A.E.P., *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta : PT Raja grafindo persada, 2013), hal. 2-3

hal ini terjadi karena di masyarakat telah terbentuk suatu pemikiran bahwa harus terdapat keseimbangan antara agama dengan keilmuan, dalam hal ini termasuk didalamnya Ilmu Ekonomi, namun sekarang hal ini sudah mulai terkikis.

Ekonom Barat mulai mengakui eksistensi Ekonomi Islam sebagai suatu Ilmu Ekonomi yang memberi warna kesejukan dalam perekonomian dunia dimana Ekonomi Islam dapat menjadi sistem Ekonomi alternatif yang mampu mengingatkan kesejahteraan umat, disamping sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan umat.¹⁶

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam, sebagai derivasi dari agama Islam, Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan, dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia termasuk dalam bidang Ekonomi. Manusia bertujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, namun manusia memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang kesejahteraan.

Ilmu Ekonomi konvensional dapat disimpulkan bahwa tujuan manusia memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa adalah untuk mencapai kesejahteraan. Manusia menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya, dan untuk inilah ia berjuang dengan segala cara untuk mencapainya.¹⁷

¹⁶ M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011, h 6

¹⁷ Pusat Pengkajian dan Perkembangan Ekonomi Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia. Ekonomi Islam, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008 hlm 11

Kesejahteraan manusia yang dikemukakan di dalam Al-Qur'an berhubungan dengan kenikmatan dan kesengsaraan manusia di akhirat, dan kriteria obyektif sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan Ekonomi seperti makanan, pendidikan perumahan, barang-barang dan jasa-jasa lainnya dan komoditi-komoditi no-materil seperti kesenantiasaan, cinta dan kasih sayang antara suami istri.

Konsep ini mengutamakan pemuasan terhadap keinginan-keinginan yang bermanfaat, menolak keinginan-keinginan yang tidak bermanfaat, dan mendorong manusia untuk mengerahkan sumber-sumber manusiawi dan materilnya untuk memenuhi keinginan-keinginan masyarakat.

Al-Qur'an mempersiapkan manusia untuk menghadapi gelombang kehidupan dengan penderitaan psikis seminal mungkin atau sama sekali tanpa penderitaan karena kematian, kehilangan harapan. Kriteria Islam mengenai kesejahteraan manusia bersifat fisik, material. Al-Qur'an menciptakan motif agar manusia dapat merasakan kenikmatan psikis karena melakukan pengeluaran untuk kepentingan pribadi dan negara yang bersifat altruistik, jadi bukan karena meyakini dan melaksanakan rumusan-rumusan Ekonomi seperti pajak-pajak yang tidak merangsang dan sedikit manfaatnya.

Sains kesusilaan Ekonomi Islam berusaha memenuhi dan memodifikasikan keinginan-keinginan, hasrat-hasrat dan kesukaan-kesukaan manusia. Prinsip penting mengenai mentalitas kultural Islam yang integral

adalah bahwa kesejahteraan Ekonomi manusia bukanlah merupakan alat penting agar ia dapat kesejahteraannya yang total.¹⁸

Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa kita lakukan salah satunya adalah pada sektor pertanian. Masyarakat pedesaan kehidupannya berbeda dengan masyarakat perkotaan. Perbedaan ini berasal dari keadaan lingkungan, yang mengakibatkan adanya dampak terhadap personalitas dan segi kehidupan. Mata pencaharian daerah pedesaan adalah bertani, tetapi mata pencaharian berdagang juga ada karena petani tidak lepas dari kegiatan usaha. Petani di pedesaan berusaha kompeten dalam bermacam-macam keahlian memelihara tanah, bercocok tanam, dan sebagainya.¹⁹

Memenuhi kebutuhan hidup sudah seharusnya manusia bekerja dengan mengolah segala yang telah disediakan di alam semesta ini, dan dari hasil kebutuhan tersebut kebutuhan manusia dapat terpenuhi, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tertier.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat adz-Dzariyat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”

¹⁸ Drs. Waqar Ahmed Husaini, Sistem Pembiayaan Masyarakat Islam, Bandung: Pustaka – perpustakaan Salman Institut teknologi Bandung, 1980 hlm293-294

¹⁹ Dr. M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar teori dan konsep Ilmu sosial, Bandung:PT Refika Aditama, 2008 hlm 131-133

Manusia telah diciptakan untuk menangani bumi ini bagi mencapai kemakmuran dan kebahagiaannya tidak boleh mengambil tindakan yang lain kecuali untuk menegakkan keadilan. Islam menghendaki supaya keadilan itu dapat dicapai dalam segala aspek hidup, termasuk kehakiman, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Manusia memandang sesuatu yang merupakan kebutuhan itu, merupakan hal yang diperlukan untuk menyempurnakan pengabdianya kepada Allah SWT, sesuai dengan fungsi diciptakannya manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT.

Manusia juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama antara satu dengan yang lainnya, seseorang tidak melecehkan hak dan kewajiban orang lain dengan hawa nafsu, ketamakan, dan keserakahan. Bentuk-bentuk tersebut antara lain seperti adanya riba, penimbunan harta, tidak memberikan upah kerja yang seogyanya, memanipulasi harga, dan monopoli.

Perspektif Islam kebijakan ekonomi berarti suatu sistem pengaturan yang sanggup mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat yang wajar dan adil. Kebijaksanaan ekonomi dalam Islam harus mensejahterakan kehidupan masyarakat, melalui perangkat-perangkat mekanisme yang lengkap, dan dapat dibedakan dari perekonomian sistem lainnya, yang sudah kita kenal di dunia pada saat sekarang ini yakni kapitalisme dan sosialisme, yang masing-masing bersaing untuk berusaha menguasai perekonomian dunia dan merupakan rujukan dalam penyelesaian masalah ekonomi.

Islam telah menawarkan dan merealisasikan konsep sistem pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat, cara pemenuhan kebutuhan pokok bagi warga

masyarakat, cara penanganan kemiskinan, perwujudan kesejahteraan hidup, dan lain sebagainya. Islam tidak berangkat dari keprihatinan sosial, yang bersifat nisbi dan kondisional atau berpijak diatas dasar nilai-nilai sosial dan kemanusiaan semata. Ekonomi Islam sebagai sebuah aturan yang dapat memecahkan problematika kehidupan manusia, yang bertitik tolak dari pandangan dasar tentang manusi dan kehidupan ini (aqidah).

Membimbing manusia menuju kesejahteraan, doktrin ekonomi yang telah mendominasi dunia kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan doktrin negara kesejahteraan, semuanya terlalu lemah, dan dinilai telah gagal lain halnya dengan Islam, dalam membimbing manusia menuju kesejahteraan Islam berupaya menegakkan sistem ekonomi yang mengkombinasikan kemajuan ekonomi dan keadilan dan menjadi standar hidup yang lebih tinggi yang disertai dengan moral yang adil, bijak dan luhur, baik itu dalam kegiatan ekonomi mikro maupun dalam ekonomi makro.

b. Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara menerus, dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang untuk menghadapi ancaman maupun tantangan yang dihadapi, melakukan perencanaan, orientasi pada perubahan yang signifikan dari keadaan sebelumnya dalam rangka pencapaian tujuan.

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang meliputi berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan

institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses perbaikan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berlangsung terus menerus menuju keadaan yang lebih baik. Pembangunan bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi serta menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang dan juga sebagai sarana pencipta hubungan antara satu dengan yang lainnya. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Pembangunan sosial tidak akan terjadi tanpa adanya pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya pembangunan ekonomi tidaklah berarti tanpa diiringi dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh.²⁰

²⁰ Midgley, Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial, 2005, hal 37.

Pembangunan Sosial sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.²¹

Pembangunan sosial pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia melalui upaya-upaya untuk mengangkat manusia dari keterbelakangan menuju kesejahteraan.²² Pembangunan sosial memiliki tiga kategori makna, yaitu : Pembangunan sosial sebagai pengadaan pelayanan masyarakat. Pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi. Pembangunan sosial sebagai upaya yang terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat.²³

Pembangunan sosial sebagai paradigma alternatif, menempatkan masyarakat sebagai pusat dari proses pembangunan dan ekonomi sebagai cara untuk melayani kebutuhan manusia, setiap orang, pemerintah, atau lembaga apapun harus menghormati arti kehidupan manusia secara global yang bertanggung jawab terhadap generasi berikutnya dan melindungi kelangsungan lingkungan hidup.²⁴

Disimpulkan bahwa pembangunan sosial adalah sebagai proses perubahan sosial yang terencana didesain untuk mengangkat kesejahteraan

²¹ Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta, 2010.

²² Adi, Isbandi Rukminto, Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2008, Hal. 50-66.

²³ Moeljarto Tjokrowinoto, Pembangunan : Dilema dan Tantangan, terjemah Khairone, 1996, hal 37-40.

²⁴ Munandar, Utami. Kreatifitas dan Keberbakatan Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif dan Bakat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal 52.

penduduk menyeluruh dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Pembangunan sosial pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kesejahteraan yang dicapai untuk membangun harkat martabat manusia dengan berlandaskan pada kemampuan dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal.

Pembangunan sosial bertujuan meningkatkan kapasitas perseorangan dan institusi mereka, memobilisasi dan mengelola sumber daya guna menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri demi mencapai hasil yang lebih baik dan mencapai keadilan sosial.

Pembangunan harus berlangsung pada suatu tingkat perubahan secara menyeluruh sehingga suatu sistem sosial, yang telah diselaraskan dengan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan dasar masing-masing pribadi dan kelompok yang beraneka ragam dalam sistem tersebut akan bergerak menjauhi kondisi hidup yang secara umum dianggap kurang memuaskan. dan mengarah ke situasi atau kondisi hidup yang secara material dan spiritual dianggap lebih baik. Tiga nilai dasar yang harus diperhatikan dalam pembangunan adalah:

1. *Sustenance*, kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar yang meliputi pangan, papan dan rasa aman.
2. *Self-esteem*, kebutuhan untuk dihargai, yaitu suatu perasaan akan nilai atau martabat dan hormat terhadap diri pribadi, sehingga tidak dimanfaatkan semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain.

3. *Free dom from servitude*, kebebasan untuk dapat memilih. Kebebasan di sini hendaknya tidak dipahami dalam makna politik atau ideologi, melainkan dalam pengertian yang lebih mendasar mengenai kebebasan atau emansipasi dari perampasan kondisi mate rial kehidupan, dari penjajahan sosial atas manusia oleh, alam, kebodohan, orang-orang lain, penderitaan, lembaga-lembaga dan keyakinan-keyakinan dogmatik.

25

²⁵ Arif Hartono, *Menelusuri Wacana Pembangunan*, Vol 4, No 1, 1999, hal 72-73.

1. Pembangunan Ekonomi menurut Ekonomi Konvensional

Pengertian pembangunan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu, tumbuh, bertambah dan berkembang, perkembangan, pertambahan, bertambah dan menjadi banyak, perihal pembangunan, proses membangun mencapai kemajuan, perkembangan dan sebagainya, atau menumbuhkan-numbuhkan segala sumber daya yang tersedia agar bertambah menjadi banyak.

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya serta infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat, sebagai implikasi dari perkembangan diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat semakin tinggi.²⁶

Ekonomi pembangunan adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara berkembang saja, dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi.

Definisi pembangunan menurut istilah ekonomi antara lain, adalah: Proses yang berlangsung secara berkelanjutan dan terus-menerus dilakukan oleh sekelompok individu, bertujuan menciptakan perubahan mendasar, berkenaan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang terbelakang, agar menjadi kelompok masyarakat ekonomi, sosial, ilmiah, dan budaya baru,

²⁶ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : Kencana, hal 3.

dimana seseorang bisa menikmati kehidupan lebih baik dari pada sebelumnya.²⁷

Menurut pandangan Adam Smith, kebijakan sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat.²⁸

Smith mengatakan bahwa apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan terus menerus berlangsung secara kumulatif dan secara otomatis memberikan peranan penting terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kinanti Geminastiti menyatakan bahwa Pembangunan Ekonomi merupakan pekerjaan rumah yang begitu besar bagi pemerintah. Dalam prosesnya, hal itu membutuhkan sebuah perencanaan yang matang agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Michael Todaro yang menyatakan bahwa pembangunan diartikan sebagai proses dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa, dan lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Prof. Meier yang menyatakan bahwa Pembangunan ekonomi bertindak sebagai proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu yang panjang.

²⁷ Halbawi, Yusuf wa ‘Abd Kharabsyah, Nahwu Mafbum Afdhal li al-Tamiyyah al-Hadisah, Beirut : Muasassah al-Raisalah, 1989, hal 13.

²⁸ Sadono, Sukirno. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan...* hlm.243

Pembangunan ekonomi konvensional sebagai suatu usaha perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan hasil produksi nasional secara umum, merubah struktur ekonomi agraris menjadi ekonomi industri, yang menjadikan bidang industry serta keahlian sebagai andalan, dan menjadikan tingkat pertumbuhan riil produk nasional dan pendapatan per-kapita sebagai indikator pokok bagi pembangunan ekonomi.

Pembangunan menurut ekonomi adalah sejumlah kegiatan ekonomi secara berkelanjutan dan terus- menerus, meliputi perubahan struktural yang berfungsi meningkatkan hasil produksi, menambah jumlah lapangan kerja, menyerap tenaga kerja baru, menciptakan perbaikan dalam kegiatan ekonomi kini dan yang akan datang, diukur dalam bentuk pendapatan riil per-kapita, yang berlangsung untuk masa yang cukup lama. Tujuannya adalah menjadikan penduduk lebih mampu untuk mencapai perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan.

Pembangunan ekonomi adalah tindakan pemerintahan secara berkesinambungan, dengan efektivitas keikutsertaan mayoritas dalam menciptakan masyarakat dalam menciptakan perubahan mendasar pada struktur ekonomi dan sosial yang saling melengkapi, serta mendayagunakan segala sumberdaya yang tersedia seefisien mungkin, untuk meningkatkan produksi dan mendistribusikannya.²⁹

²⁹ E. Syaifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Bandung : Gunung Jati Press, 2012, hal 27

2. Pembangunan Ekonomi dalam Islam

Pembangunan ekonomi menurut Islam adalah proses mencapai tujuan, sebagaimana dimaksud dalam perintah agar mewujudkan kemakmuran bumi yaitu kesejahteraan, yang ditegaskan al-Khaliq kepada manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi.

Kemakmuran atau kesejahteraan hidup di bumi hanya bisa diwujudkan dengan bekerja, yang menghasilkan nilai ekonomi dan sosial, sebagai kontribusi pada proses pembangunan yang bertujuan menciptakan kemakmuran. Pembangunan ekonomi dalam Islam, berdasarkan atas pemahaman terhadap syari'ah yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist, dengan menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai pengetahuan tentang konsep pembangunan klasik dan modern, serta pengalaman negara telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan.

Manusia sebagai khalifah di bumi ini wajib mengelola dan menjaga sehingga tidak terjadi kerusakan, karena apa yang ada di bumi ini hanyalah milik Allah semata, sebagaimana yang dijelaskan dalam Qur'an Surat Al An'am ayat 165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya : Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Qur'an Surat Al An'am menjelaskan bahwa secara prinsipil pemahaman Islam tentang pembangunan berlandaskan tauhid dan konsep

kekhalfahan, yang di dalamnya mengandung unsur ibadah tunduk pada setiap perintah-Nya. Pembangunan ekonomi menurut Islam dan ekonomi umum tidak ada perbedaan, kecuali adanya faktor keikhlasan ibadah dalam pengertian menurut Islam.

Pembangunan sarana dan prasarana fisik mempunyai peranan yang penting untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, pemerataan dan kesejahteraan rakyat.

Realisasi tujuan pembangunan secara umum adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan dengan meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) disertai dorongan dan padu padan pembangunan dibidang lainnya.

Pembangunan dibidang lainnya yang berkaitan dengan infrastruktur, pada penelitian membangun ekonomi pedesaan dengan financial inclusion melalui lembaga keuangan syariah, infrastruktur merupakan syarat mutlak bagi berjalannya bagi bidang penunjang lainnya, seperti financial inclusion yang merupakan hak rakyat untuk bisa mendapatkan edukasi dan pemberdayaan ekonomi demi meningkatkan taraf hidup.

Pembangunan merupakan kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisiawal ekonominya kurang lebih bersifat statis menciptakan perubahan yang lebih baik dengan peningkatan pendapatan nasional.³⁰

³⁰ Ika Y. Fauzia. Membangun Ekonomi Pedesaan dengan Financial Inclusion melalui Lembaga Keuangan Syariah. (An-Nisbah, Vol.01, No.02 April 2015) hal. 194.

Sasaran realisasi pembangunan pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (intergeneration equity) yang berarti pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam) untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam) yang berkelanjutan antar generasi.³¹

Islam dalam menegakkan hukum-hukumnya didasarkan atas landasan keadilan di antara manusia. Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil dalam Qur'an surat An Nahl ayat 90.

عَنْ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيْتَايِ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ
(٩٠) تَذَكَّرُونَ لِعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu mendapat pelajaran”. Al-Qur'an Surah an-Nahl Ayat 90.

Pembangunan ekonomi konvensional maupun ekonomi pembangunan dalam Islam sama-sama memiliki hubungan yang sangat erat dengan ekonomi pembangunan, walaupun memiliki arti yang berbeda satu sama lainnya. Ekonomi pembangunan diartikan sebagai studi ilmu ekonomi yang membahas tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang serta mengkaji berbagai kebijakan yang di ambil oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut.

31 Prof. Dr. Ir. Ali Kabul Mahi, Dr. Sri Indra, Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal 41.

Aspek-aspek ekonomi terdapat beberapa perbedaan dalam pembangunan ekonomi konvensional dan pembangunan ekonomi dalam Islam. Dilihat dari pengertiannya, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi baik itu konvensional maupun dalam Islam, membahas tentang hal yang berkaitan dengan berbagai masalah ekonomi yang dihadapi negara berkembang.

3. Faktor-faktor Pembangunan

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di antaranya :

Faktor Sumber Daya Manusia, Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

Jumlah penduduk, menurut Adam Smith bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi, karena bertambahnya penduduk akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meninggikan tingkat spesialisasi dalam perekonomian spesialisasi tersebut, akibatnya maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah tinggi.³²

³² Sadono, Sukirno, Ekonomi Pembangunan. Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan. Kencana Predana Media Group. Jakarta, 2010, hal 244.

Perkembangan spesialisasi dan pembagian pekerjaan akan mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Perkembangan penduduk yang berjalan dengan cepat akan memperbesar jumlah penduduk menjadi dua kali lipat dalam waktu satu generasi, akan menurunkan kembali tingkat pembangunan ketaraf yang lebih rendah. Pada tingkat ini pekerja akan menerima upah sangat minimal, dan ini dapat menyebabkan tingkat perekonomian mencapai stationary state dan pembentukan modal sulit dicapai yang mengakibatkan pengusaha sulit mendapatkan keuntungan.

Faktor Sumber Daya Alam, sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud di antaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

Faktor Budaya, faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan di antaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Budaya yang dapat menghambat proses pembangunan di antaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

Sumber Daya Modal, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Kebijakan Pemerintah, Kebijakan pemerintah terhadap masalah moneter, berpihak pada pergerakan sektor riil dan kemudahan dalam aktivitas bisnis akan memudahkan pertumbuhan ekonomi. Faktor non ekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku.

c. Wisata

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek atau daya tarik.³³ Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di

³³Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

tempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu unsur penting dalam dunia kepariwisataan. Objek dan daya tarik wisata dapat menyukseskan program pemerintah dalam melestarikan adat dan budaya bangsa sebagai asset yang dapat dijual kepada wisatawan. Objek dan daya tarik wisata dapat berupa alam, budaya, tata hidup dan sebagainya yang memiliki daya tarik dan nilai jual untuk dikunjungi ataupun dinikmati oleh wisatawan. Daya tarik wisata atau menarik wisatawan dapat disebut sebagai objek dan daya tarik wisata.

Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian di antara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri (diluar negeri), meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain (daerah tertentu, suatu negara atau benua) untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya di mana ia memperoleh pekerjaan tetap.

Pengertian kepariwisataan terdapat beberapa faktor penting yang mau tidak mau harus ada dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor-faktor yang dimaksudkan antara lain adalah:

- a. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu
- b. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya
- c. Perjalanan itu, walaupun ada bentuknya, harus selalu di kaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi
- d. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas kita lebih cenderung untuk memberikan definisi pariwisata sebagai berikut: pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi

semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Allah menjelaskan dalam Qur'an Surat Ar rum ayat 9 tentang perintah wisata yang baik dan benar :

أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا

وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya : Dan Apakah mereka tidak Mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak Berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang Berlaku zalim kepada diri sendiri.

Qur'an Surat Ar Rum menjelaskan bahwa manusia dalam melakukan kegiatan wisata di bumi ini harus memperhatikan dampak dari pengelolaan wisata tersebut. Manusia harus mengedepankan kemaslahatan bersama serta tidak dzalim karena seluruh alam seisinya hanya milik Allah SWT.

1. Jenis dan Macam Pariwisata

Potensi yang dimiliki atau warisan yang diberikan Tuhan kepada setiap Negara, maka munculah jenis dan macam-macam pariwisata yang dikembangkan sebagai kegiatan, yang lama kelamaan memiliki cirinya sendiri. Macam pariwisata berkembang pada saat ini:

1) Pariwisata Lokal (Local Tourism)

Yang dimaksudkan dengan jenis pariwisata semacam ini adalah pariwisata setempat, yang memounyai ruang lingkup relatif sempit dan tertata dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya kepariwisataan kota Solo atau kepariwisataan di daerah Bandung saja.

2) Pariwisata Regional (Regional Tourism) Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu tempat atau daerah yang ruang lingkupnya lebih luas bila dibandingkan dengan “local tourism”, tetapi lebih sempit jika dibandingkan dengan kepariwisataan nasional. Contohnya, kepariwisataan Jawa Tengah, Bali, dan lain-lain.

3) Kepariwisataan Nasional (National Tourism)

Kepariwisataan Nasional dalam arti sempit Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang dalam wilayah suatu Negara. Pengertisn ini sinonim dengan pengertian pariwisata dalam negeri atau domestic tourism, dimana titik beratnya orang

yang melakukan perjalanan wisata adalah warga Negara sendiri dan orang-orang asing yang berdomisili di Negara tersebut.

Kepariwisata nasional dalam arti luas. Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang dalam suatu wilayah suatu Negara, selain kegiatan domestic tourism juga dikembangkan foreign tourism dan out going tourism. Jadi selain adanya lalu lintas wisatawan dalam negeri sendiri, juga ada lalu lintas wisatawan dari luar negeri, maupun dari dalam negeri ke luar negeri.

d. Pembangunan Wisata

Pembangunan wisata adalah suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari sarana dan prasarana, Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), dan aspek-aspek lainnya.³⁴

Pembangunan pariwisata dipandang lebih menekankan pada aspek fisik, namun dalam perkembangannya masyarakat dan pemerintah terkait menyadari bahwa pengelolaan pariwisata tanpa memandang aspek sosial budaya masyarakat justru akan menimbulkan dampak buruk bagi kearifan lokal masyarakat itu sendiri. Pariwisata mempunyai daya dobrak yang cukup kuat untuk merusak kebudayaan masyarakat

³⁴ peraturan pemerintah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2010-2025.

khususnya di daerah pariwisata. Dengan demikian pariwisata mendatangkan serangkaian dampak positif maupun negatif.³⁵

Proses adalah perjalanan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan.³⁶ Pengelolaan pariwisata menurut Suwarno yang dikutip oleh Argyo Demartoto adalah pengendalian atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran.³⁷ Obyek dan daya tarik wisata umumnya terdiri atas sumberdaya hayati dan non hayati, dimana masing-masing memerlukan pengelolaan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya pengelolaan obyek dan daya tarik wisata harus memperhitungkan berbagai sumber daya wisatanya secara berdaya guna agar tercapai sasaran yang diinginkan. Proses pengelolaan pariwisata mempunyai dua bentuk pengelolaan:

1. Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*)

Bentuk pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (*communiy based tourism*) dikembangkan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keselaran antara kepentingan berbagai *stakeholder* pembangunan pariwisata termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat. Prinsip pembangunan *Community Based Tourism*

³⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata....*, hal. 1

³⁶ Jim Ife & Frank Terosiero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, terj. Sastrawan Manullang, dkk, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hal. 336.

³⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata....*, hal. 57.

menekankan pada pembangunan pariwisata “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”.

Tahapan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sampai dengan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi, masyarakat setempat harus dilibatkan secara aktif dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi karena tujuan akhir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.³⁸

Community Based Tourism merupakan model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal. *Community Based Tourism* bukanlah bisnis pariwisata yang bertujuan hanya untuk memaksimalkan profit atau keuntungan bagi para investor. *Community Based Tourism* lebih terkait dengan dampak pariwisata bagi masyarakat setempat dan sumber daya lingkungan (*envirinmental resources*)..³⁹

Prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai *tool of community development* bagi masyarakat lokal dan pemerintah yakni:⁴⁰

1. Mengakui mendukung dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat.

³⁸ Argyo Demartoto, *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*, (Surakarta: UNS Press, 2009), hal. 20.

³⁹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata.....*, hal. 71.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 72.

2. Melibatkan anggota masyarakat sejak awal pada setiap aspek.
3. Mempromosikan kebanggaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas hidup.
5. Menjamin keberlanjutan lingkungan.
6. Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik.
7. Membantu mengembangkan pembelajaran mengenai pertukaran budaya antar daerah, bahkan antar negara (*cross cultural learning*).
8. Menghormati perbedaan-perbedaan kultural dan kehormatan manusia.
9. Mendistribusikan keuntungan secara adil di antara anggota masyarakat.
10. Menyumbang prosentase yang ditentukan bagi *income* proyek masyarakat.

Tool of community development memberikan dampak bagi masyarakat lokal ini dapat dilihat seberapa jauh peran *stakeholder* yaitu pemerintah, swasta (investor) dan terutama masyarakat dalam pengembangan pariwisata harus menjadi prioritas paling utama, terutama dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah dan swasta (investor), hal ini di karenakan yang mengetahui lebih jauh terkait kondisi sosial, budaya dan sumber daya alam yang ada di wilayah pariwisata adalah masyarakat.

Pola pengembangan *Community Based Tourism* dilakukan secara bersama-sama antara ketiga elemen yang disebut *stakeholder* yaitu pemerintah, swasta (investor), dan masyarakat. Fungsi yang berbeda akan tetapi mempunyai kepentingan yang sama, yaitu bagaimana pengelolaan pariwisata dapat memberdayakan masyarakat tidak hanya dalam segi ekonomi namun dalam segi pendidikan, pelestarian dan promosi budaya lokal.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk pengelolaan pariwisata model ini menjadi elemen utama, karena *stakeholder* utama atau pokok dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah perencanaan pembangunan yaitu:⁴¹

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program-program pembangunan tidak akan optimal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam setiap tahapan atau

⁴¹ *Ibid.*, hal. 18-19

prosesnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring. Dengan demikian mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap program tersebut.

3. Merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri. Masyarakat mempunyai hak untuk turut serta dalam menentukan dan merencanakan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah.

2. Pengelolaan Pariwisata *Top Down*

Top down adalah kebijakan yang bersumber dari pusat dan lebih mendahulukan kepentingan nasional tanpa memperhatikan rakyat di tingkat bawah.⁴² Kebijakan ini banyak digunakan diseluruh kebijakan yang dikeluarkan di era Presiden Soeharto, kebijakan ini seringkali mengecilkan peran dan fungsi nilai-nilai lokal yang ada di daerah.

Dampak jangka panjang yang dirasakan dari bentuk pengelolaan ini adalah menurunnya daya kreatifitas masyarakat karena masyarakat terbiasa pada pola petunjuk dari atas atau *top down*. Masyarakat menikmati kebijakan tanpa bisa merumuskan kebijakan sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat setempat.⁴³

⁴² *Ibid.*, hal. 38.

⁴³ Argyo Demartoto, *Pariwisata Berbasis.....*, hal. 49.

3. Dampak Pengelolaan Pariwisata

Dampak diartikan sebagai adanya suatu benturan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan pembangunan proyek dengan kepentingan usaha melestarikan kualitas lingkungan yang baik.⁴⁴ Sumber devisa yang diperhitungkan pariwisata hendaknya mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka mencapai kesejahteraan yang diinginkan, pendapat ini dikemukakan mengingat dalam kehidupan didominasi oleh pandangan yang berorientasi pada pembangunan semata (*development oriented*), sehingga tidak jarang pembangunan yang lebih menekankan pada kepentingan masyarakat menjadi terlewatkan dan nilai-nilai kemanusiaan (*humanism*) menjadi terabaikan.⁴⁵

Pengelolaan pariwisata yang baik adalah haruslah mementingkan berbagai aspek yang ada di masyarakat bukan hanya sebatas peningkatan ekonomi semata dan pengelolaan harus berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan dapat di definisikan sebagai pembangunan kepariwisataan yang memperhatikan kelestarian alam. Pada dasarnya dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada dapat kita jadikan sebagai obyek wisata, namun

⁴⁴ Gunawarman Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hal.2.

⁴⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata.....*, hal 1.

lambat laun seiring berjalannya waktu, maka potensi alam akan semakin tergerus, tetapi aspek lingkungan sosial budaya pun akan tergerus.

Pembangunan sektor pariwisata di berbagai belahan dunia ini telah berdampak pada berbagai dimensi kehidupan manusia, tidak hanya berdampak pada dimensi sosial ekonomi semata, namun juga menyentuh dimensi sosial, budaya, bahkan lingkungan fisik. Dampak terhadap berbagai dimensi, bukan hanya bersifat positif, tetapi juga berdampak negatif.

Pariwisata dapat meningkatkan berbagai pembangunan dari berbagai sektor bukan hanya pariwisata itu sendiri, seperti dalam teori *trickle down effect* artinya pemerataan mengikuti pada tumbuh kembangnya suatu pembangunan.⁴⁶ Pengelolaan pariwisata dikelola dengan baik akan berdampak sektoral terhadap pembangunan yang lain seperti pembangunan tempat ibadah seiring banyaknya wisatawan yang datang dari berbagai wilayah bahkan dari berbagai negara, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, infrastruktur, dan pembangunan yang lainnya, oleh karena itu

⁴⁶ *Trickle Down Effect* adalah sebuah sistem perekonomian peninggalan para kapitalis, yang dianut oleh Indonesia sejak zaman Oerde Baru hingga saat ini. Sistem ini dianggap sebagai sistem perekonomian yang paling ideal untuk memajukan perekonomian suatu bangsa, karena pola ekonominya yang dianggap dapat menyejahterakan bangsa dari level atas hingga paling bawah. *Trickle Down Effect* ini cukup terkenal dan dipakai oleh hampir semua negara maju di seluruh dunia.

pariwisata menjadi andalan di berbagai daerah maupun di negara berkembang.

Akibat negatif selalu mengikuti seiring berjalannya waktu, misalnya terjadinya penurunan kualitas lingkungan alam, sosial dan kebudayaan, kesenjangan ekonomi antar masyarakat setempat dengan para penanam modal. Maraknya ekspansi pariwisata dan investasi modal asing di daerah-daerah dan wilayah perdesaan mengakibatkan terjadinya marginalisasi posisi ekonomi masyarakat setempat.⁴⁷ Pariwisata ini merupakan suatu terobosan yang pada hakekatnya bisa dijadikan sebagai komoditas andalan untuk menambah devisa negara melalui pengelolaan di daerah yang benar.

Community Based Tourism adalah sebagai konsep pengelolaan pariwisata yang bisa dijadikan alternatif dari beberapa dampak negatif yang ada dengan menekankan keselarasan antara *stakeholder*. Pengelolaan potensi pariwisata serta dalam konsep *community based tourism* masyarakat harus terlibat lebih jauh dalam tahapan pembangunan dari mulai perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pengembangan, pemantauan, bahkan sampai evaluasi.

⁴⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata.....*, hal. 12

Konsep ini diharapkan pengelolaan pariwisata akan lebih berkembang dengan berkelanjutan tanpa merusak sumber daya alam, maupun lingkungan sosial budaya yang ada di masyarakat.⁴⁸

e. Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat yang karena ketidakmampuannya baik karena faktor internal maupun eksternal. Pemberdayaan diharapkan mampu mengubah tatanan hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, sebagaimana cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, sejahtera dan maju. Pemberdayaan masyarakat kini telah menjadi agenda penting pemerintah, terutama sebagai kelanjutan dari kegagalan konsep pembangunan masa lalu.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 33.

⁴⁹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat; dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012, h. 1

Tidak hanya pemerintah, tapi dunia usaha juga memiliki program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat, (Corporat Social Responsibility/CSR), namun hal ini seringkali bertentangan dengan kenyataan dilapangan. Program pemberdayaan kurang mengena sasaran, karena sering dilakukan secara charity, ditambah lagi program pemberdayaan malah menguras dan memperdayai rakyat, sehingga praktek korupsi semakin merajalela, yang kaya semakin berkuasa, yang miskin semakin tidak berdaya.

Pengentasan kemiskinan hakikatnya adalah mengubah perilaku, yang dimulai dari mengubah mindset individu dan masyarakat. Pengentasan kemiskinan hanya dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ialah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan).⁵⁰

⁵⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), Cet. Ke-3, h. 57

Pemberdayaan ialah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, karena kemiskinan dan keterbelakangan menyebabkan tumbuh suburnya ketidakberdayaan. Kemiskinan secara umum ada empat jenis, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural.

Kemiskinan absolut yaitu tingkat ketidak berdayaan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti, pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

Kemiskinan relatif yaitu, kesenjangan distribusi pendapatan dengan rata-rata distribusi, dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatannya dengan masyarakat sekitarnya.

Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Kemiskinan kultural terkait dengan faktor sikap individu atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, boros, tidak kreatif sehingga menyebabkan kemiskinan.

Usaha-usaha pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan disesuaikan dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang belum memperoleh lapangan kerja, atau dengan kata lain masyarakat yang belum bekerja, memfokuskan pemberdayaannya untuk meningkatkan potensi yang dimiliki dalam meraih kesempatan kerja, sedangkan bagi masyarakat yang telah bekerja pemberdayaannya adalah peningkatan kemampuan untuk berprestasi.⁵¹

1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian strategi dan pemberdayaan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, strategi pemberdayaan masyarakat, ialah upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat. Beberapa strategi pemberdayaan masyarakat yang bisa menjadi pilihan dalam

⁵¹ Makmur, Filsafat Administrasi, (Jakarta: Bumi Akasara, 2008), h. 125

melaksanakan pemberdayaan masyarakat, strategi dengan tiga pendekatan antara lain:

a. Pendekatan mikro.

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya untuk membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).

b. Pendekatan mezz.

Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap klien agar mampu memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

c. Pendekatan makro.

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat,

manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.⁵² Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk pemerataan pendapatan dan bersikap adil terhadap sesama, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat Adz Dzariyat ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Firman Allah pada ayat ini dengan tegas dan jelas mengisyaratkan kepada kita bahwa pemberdayaan ekonomi diproyeksikan demi kesejahteraan bersama. Islam menolak keras sistem

⁵² 1Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 242

ekonomi dalam bentuk monopoli, oligopoli dan ekonomi yang diorientasikan hanya untuk kepentingan pribadi.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menurut koordinasi dan kerja sama serta peran yang berimbang antara berbagai unsur *stakeholder* termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, oleh karena itu salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat adalah pendekatan partisipatif.

Pendekatan ini untuk mendorong terbentuknya kemitraan diantara pihak *stakeholder* terkait, selain itu, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat diarahkan untuk mengurangi tekanan terhadap obyek dan daya tarik wisata sehingga pembangunan pariwisata dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Masyarakat setempat harus didasarkan atas potensi yang dimiliki sehingga mempunyai rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) terhadap aneka sumber daya alam dan budaya sebagai aset pembangunan pariwisata.⁵³

2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

⁵³ *Ibid.*, hal. 20-21.

- (1) Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi.
- (2) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran.
- (3) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi.
- (4) Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tuna daya.⁵⁴

3. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Masyarakat diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang

⁵⁴ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), hal 1-2

membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini good governance yang telah dielu-elukan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan.

Good governance adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta.

f. Ekonomi

Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas liputannya, oleh sebab itu sangatlah sukar untuk membuat definisi yang akan memberikan gambaran yang tepat mengenai analisis-analisis yang diliputi oleh ilmu ekonomi, namun demikian ini tidaklah berarti bahwa suatu definisi yang secara ringkas menerangkan bidang studi ilmu ekonomi. Definisi ilmu tersebut selalu dihubungkan kepada keadaan ketidak seimbangan di antara kemampuan faktor-faktor

produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa⁵⁵

Ilmu Ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumberdaya yang langka. Berdasarkan definisi tersebut, titik persoalan ekonomi adalah kelangkaan yang berarti masyarakat memiliki sumberdaya terbatas, sehingga mereka tidak dapat memproduksi semua barang yang diinginkan. Kelangkaan ini kemudian bertolak belakang dengan naluri manusia untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkannya. Teori tersebut kemudian menjadi ruang eksistensi ilmu ekonomi untuk membantu masyarakat untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhannya dengan sumberdaya yang terbatas.

Pemikiran ekonomi sudah ada bersamaan dengan adanya manusia itu sendiri. Kurun waktu selama itu tentunya banyak sekali fakta-fakta sejarah pembangunan sistem ekonomi sebagai pijakan pembangunan ekonomi yang lebih baik di masa mendatang, akan tetapi mengumpulkan dokumen bukti-bukti yang mengisahkan pemikiran ekonomi sangat sulit, walaupun ada dokumen tersebut sulit untuk diverifikasi kebenarannya karena tradisi penulisan/publikasi belum intensif dilakukan.

⁵⁵ Sadono Sukirno, *Mikroi Ekonom: Teori Pengantar*, Ed. 3, cet. 26, (Jakarta: Rajawali Pre, 2011), hlm. 8.

Pemikiran paling awal yang bisa dijadi adalah pemikiran ekonomi pada masa Yunani Kuno. Pemikiran-pemikiran ekonomi Yunani kuno sering dikaitkan dengan etika moral, begitu juga dengan aliran skolastik yang menghubungkan nilai-nilai ekonomi dengan ajaran gereja. Dua aliran ini belum memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian modern, sedangkan satu pemikiran di era pra klasik yang cukup memberikan kontribusi pemikiran secara signifikan adalah pemikiran ekonomi masa merkantilisme. Masa ini berhasil mengembangkan teknik-teknik abstrak untuk menemukan hukum-hukum ekonomi.

Sistem perekonomian suatu negara seperti layaknya kehidupan biologis manusia antara bagian satu dengan bagian lainnya membentuk suatu kesatuan yang harmonis, begitu juga proses dan gejala kehidupan ekonomi jika dilihat hubungan antar bagian saling membentuk suatu keseluruhan dengan hukum-hukum tersendiri. Pola dan garis pemikiran Quesnay sudah tersusun dalam suatu kerangka dasar analisis tertentu mengenai gejala, peristiwa-peristiwa, dan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

Perekonomian akan berkembang jauh lebih baik jika dibiarkan sendiri dan tidak usah diatur-atur atau direncanakan, sesuai faham *laissez-faire*, *laissez passer*. Pandangan Smith tersebut tidak disetujui oleh pemikir-pemikir sosialis, terutama oleh Karl Marx. Pemikir Sosialis

lebih menginginkan agar perekonomian serba direncanakan, diatur, dan diawasi secara ketat oleh pemerintah. Sistem yang ditawarkan adalah sosialisme, dalam sistem sosialis tidak ada perbedaan yang mencolok antara yang kaya dan yang miskin.⁵⁶

J.M. Keynes mengkritik dan mencoba memperbaiki asumsi Say bahwa permintaan pada umumnya lebih kecil dari pendapatan, dengan demikian perekonomian sering dalam posisi tidak seimbang, walaupun seimbang, terjadi pada tingkat output rendah dan sumber-sumber daya tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Karena perekonomian tidak selalu dalam posisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh maka campur tangan pemerintah diperlukan dalam rangka mengarahkan perekonomian pada keadaan yang diinginkan.

Pandangan Keynes tersebut menciptakan revolusi dalam pemikiran ekonomi. Perekonomian yang semula hanya dilihat dari sisi mikro, orang mulai melakukan pendekatan makro. Selama kurun waktu empat dekade sejak tahun 30-an sampai 70-an pandangan Keynes mendapat tempat dibanyak negara terutama negara berkembang yang ingin memacu pertumbuhan ekonominya. Pada fase ini, pemikiran

⁵⁶ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), hlm. 2.

Keynes mendominasi profesi ekonomi dan kebijakan publik yang berarti dominasi klasik kembali diturunkan.

Saran dari pandangan moneteris sedikit banyak mirip aliran sisi penawaran, titik temu dari pemikiran ini adalah sama-sama menganjurkan kebijaksanaan pemerintah yang lebih kontraktif. Pandangan ini juga didukung oleh aliran Rational Expectation (Ratex) yang dimiliki tokoh diantaranya Robert Lucas, Thomas Sargeant, Neil Wallace, Robert Barro, Leonard Rapping, Edward Prescott, David Begg, Steven Sheffrin dan John Muth. Jasa dari pemikiran Ratex ini diantaranya telah menemukan kerangka teoritis yang fundamental dengan sebutan pendekatan keseimbangan ekspektasi (rational expectations equilibrium approach) dalam teori makro. Kelemahan dari aliran ini adalah masih sedikitnya bukti-bukti empiris yang tersedia.

Melihat perkembangan pemikiran ekonomi diatas, pakar-pakar ekonomi ada yang percaya bahwa kedepan akan terjadi penggabungan ilmu ekonomi secara utuh antara ekonomi mikro dan makro, bahkan mungkin kedepan akan memunculkan alternatif aliran-aliran ekonomi yang sebelumnya belum mendapatkan ruang semisal aliran ekonomi Islam.

Ekonomi Islam bisa menawarkan sebuah sistem yang dapat membangun perekonomian lebih beradab karena menawarkan sisi moral

yang selama ini cenderung terabaikan dalam analisa ekonomi dan seringkali menyebabkan terjadinya gejolak ekonomi. Perbedaan mendasar dalam ekonomi Islam dan ekonomi lainnya, yaitu ekonomi Islam memadukan antara ilmu dan etika, atau juga seperti tidak memisahkan antara ilmu-ilmu yang lain dengan etika seperti ilmu politik, teknik, antropologi, militer, kedokteran dan lainnya. Islam merupakan risalah yang diturunkan Allah melalui rasul untuk membenahi akhlak manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”. Penjelasan hadist Rasulullah tersebut menegaskan bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi manusia harus mengedepankan akhlak.

Persoalan moralitas titik tekan ekonomi Islam adalah persoalan fungsi uang yang hanya bermotif transaksi (transaction motives) dan motif berjaga-jaga (precautionary motives) tanpa adanya motif spekulasi (speculative motives) seperti yang disampaikan Keynes. Al-Ghazali dalam Ihya Ulu- muddin menerangkan bahwa Islam melarang memperdagangkan uang, memperdagangkan uang sama artinya memenjarakan uang sehingga fungsi untuk bertransaksi tidak berjalan dengan baik.

Kondisi ini menyebabkan sektor moneter tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi riil sehingga perekonomian secara keseluruhan mudah diguncang. Ketika saham hanya ditentukan permintaan dan penawaran saham dengan mengabaikan kinerja secara riil maka akan menyimpan potensi bahaya terhadap perekonomian, karena dalam perekonomian seringkali terjadi rekayasa-rekayasa harga saham, salah satunya adalah insider trading.⁵⁷

Krisis ekonomi dan keuangan global yang terjadi berulang-ulang di negara-negara kapitalis mungkin menjadi petunjuk masyarakat Indonesia, bahkan dunia, untuk meninggalkan neo-liberal. Pilihan yang masuk akal dan cerdas menurut pakar ekonomi Islam adalah meninggalkan sistem yang bobrok tersebut dan bergerak ke arah ekonomi syariah yang lebih adil, hal ini tidak diserukan orang-orang islam, tetapi orang non muslim.

Sistem ekonomi merupakan sebuah konsep fundamental sekaligus mekanisme melakukan aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi dapat memengaruhi keinginan dan aspirasi suatu masyarakat,

⁵⁷ N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics: Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009) hlm. 41.

sehingga akan menentukan kepribadian ideal seseorang.⁵⁸ Sistem ekonomi juga dapat menentukan arah kebijakan ekonomi bagi sebuah negara tertentu. Suatu negara akan menganut sistem ekonomi yang sesuai dengan arah kebijakannya.

Sistem ekonomi juga memperlihatkan pola pikir, budaya, dan peradaban yang berkembang dalam sebuah masyarakat. Sistem ekonomi konvensional, untuk membandingkan dengan sistem ekonomi Islam, merupakan produk pemikiran, budaya dan peradaban sebuah masyarakat.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan, dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional. Manusia wajib hukumnya untuk mencari rizki di bumi ini.

⁵⁸ Munawar Ismail, dkk., Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014) hal. 16.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al Baqarah ayat 198.

مَنْ أَفْضَلُكُمْ فَإِذَا رَّبِّكُمْ مِنْ فَضْلًا تَبَتُّغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ
 وَإِنْ هَدَيْتُمْ كَمَا وَادَّكُرُوهُ الْحَرَامِ الْمَشْعَرِ عِنْدَ اللَّهِ فَادَّكُرُوا عَرَفَتِ
 الضَّالِّينَ لَمِنْ قَبْلِهِ مِنْ كُنْتُمْ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

Surat Al Baqarah ayat 198 menjelaskan bahwa manusia wajib mencari rizki di bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia wajib berupaya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Pembahasan dari ayat tersebut sangat tepat seperti yang dilakukan oleh masyarakat sekitar sungai Ngrowo, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya memanfaatkan alam yang ada sebagai upaya peningkatan pendapatan.

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam periode tertentu. Pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan aka barang yang dikonsumsi bukan

saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut juga ikut menjadi perhatian, misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah beras yang kualitasnya kurang baik, tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka kualitas beras yang dikonsumsi menjadi lebih baik.⁵⁹

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan daerah tersebut akan rendah pula. Demikian pula dengan pendapatan masyarakat, jika pendapatan suatu masyarakat relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.⁶⁰

Berikut ini merupakan factor-faktor yang mempengaruhi pendapatan, antara lain:⁶¹

1. Jumlah factor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil tabungan dan warisan atau pemberian
2. Harga per unit dari masing-masing factor produksi yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar
3. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

⁵⁹ Soekartawi, *Faktor-Faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 132.

⁶⁰ Mahyu Danil, Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen, dalam *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No.7: 9.

⁶¹ Budiono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 150.

g. Masyarakat

Masyarakat dalam Bahasa Inggris disebut *Society*, asal katanya *Socius* yang berarti “kawan”. Kata “Masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu *Syiek*, artinya “bergaul”, adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk – bentuk akhiran hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai pribadi melainkan oleh unsur – unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.

Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan *Community Based Tourism* berperan di semua lini pembangunan baik sebagai perencana, investor, pelaksana, pengelola, pemanatau maupun evaluator, namun demikian meskipun pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menekankan pada faktor masyarakat sebagai komponen utama, keterlibatan unsur lainnya seperti pemerintah dan swasta sangat diperlukan. Masyarakat setempat atau mereka yang bertempat tinggal disekitar daerah tujuan wisata mempunyai peranan penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata di daerahnya.

Manusia di dalam dirinya memiliki naluri yang mendorong pada kehidupan sosial seperti interaksi, kerjasama dan saling menyayangi,⁶²

⁶² Abu Ahmadi · Pengantar Sosiologi, (Ramadani, Solo, cetakan pertama, 1989), hal: 55

oleh karena itu menyukai kehidupan di sekitar masyarakat untuk memenuhi naluri ini, dan juga untuk menumbuhkan kekuatan dalam interaksi/komunikasi diantara mereka.

Seseorang memulai pembentukan komunitas yaitu seorang individu belajar bagaimana menjadi anggota dalam keluarganya dan di dalam masyarakatnya yang ia tinggali serta dalam kelompok komunitasnya semenjak kanak-kanak dan berkembang seiring pertumbuhannya dan pembelajaran pada tingkatan yang dilalui oleh individu tersebut dan berfikir, merasakan, melaksanakan urusan-urusan dengan jalan menyerupai apa yang dilakukan oleh individu yang lainya di masyarakat, dan setiap perbuatan individu berhubungan dengan karakteristik dan keistimewaan yang menjadi fitrah yang ada pada dirinya sendiri.

Al-Qur'an menyebutkan karakteristik dan keistimewaan yang berbedabeda antar manusia, hingga ada seseorang yang istimewa dari pada yang lainya, dan pengetahuan menjadi dasar dan pembeda antar manusia dalam kehidupan social dan bermasyarakat. Maka Allah mengangkat derajat ulama, sebagaimana firmanNya:

دَرَجَاتٍ الْعِلْمِ أَوْتُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ

Kekuatan manusia berbeda-beda, begitu juga kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan yang baik. Ini semua tidak menjadikan

seseorang berpisah dari kehidupan sosial karena ia makhluk sosial dan saling mengenal satu ama lain serta saling membantu dan saling membutuhkan.

Suatu masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem-sistem, adat istiadat, ritus-ritus serta hukum-hukum khas, dan yang hidup bersama. Kehidupan manusia hidup bersama-sama di suatu wilayah tertentu dan sama-sama berbagai iklim serta makanan yang sama.

Kehidupan manusia bersifat kemasyarakatan, artinya secara fitrah bersifat kemasyarakatan, kebutuhan, keuntungan, kepuasan, karya dan kegiatan manusia, pada hakikatnya, bersifat kemasyarakatan, dan sistem kemasyarakatannya akan tetap selama ada pembagian kerja, pembagian keuntungan dan rasa saling membutuhkan dalam suatu perangkat tertentu tradisi dan sistem. Masyarakat dengan kata lain merupakan suatu kelompok manusia yang, di bawah tekanan serangkaian kebutuhan dan di bawah pengaruh seperangkat kepercayaan, ide dan tujuan, tersatukan dan terlebur dalam suatu rangkaian kesatuan kehidupan bersama.⁶³

⁶³ Murtadho Muthohari, *Masyarakat dan Sejarah: Kritik Islam Atas Marxisme Dan Teori Lainnya*, (Bandung: Mizan, 1995) hal:15

Masyarakat yang dikenal di dunia ini, sampai batas tertentu, bersifat religius, akan tetapi meskipun telah ada kesepakatan substansial yang dalam prakteknya merupakan cakupan dan corak data yang harus dicoba untuk diatasi oleh setiap ahli (dan pengkaji) sosiologi agama.

a) Masyarakat Pedesaan (masyarakat tradisional)

a. Pengertian desa/pedesaan

Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri.⁶⁴

Ciri ciri desa sebagai berikut :

- a) Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
- b) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan
- c) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam seperti : iklim, keadaan alam ,kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan

Tradisi artinya Adat istiadat dan kepercayaan yang turun menurun dipelihara, dan ada beberapa pendapat yang ditinjau dari berbagai segi bahwa, pengertian desa itu sendiri mengandung kompleksitas yang saling berkaitan satu sama lain diantara unsur-unsurnya, yang sebenarnya desa masih dianggap sebagai standar dan pemelihara sistem kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti tolong menolong, keguyuban, persaudaraan, gotong royong, kepribadian dalam berpakaian, adat istiadat, kesenian kehidupan moral susila dan lain-lain yang mempunyai ciri yang jelas.

Pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan bagian vital bagi keberadaan bangsa Indonesia. Desa

⁶⁴ Drs. H. Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, 2003, Hal.241

merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia. Keragaman telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa, dengan demikian penguatan desa menjadi hal yang tak bisa ditawar dan tak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh.

Kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pembangunan desa mengedepankan sederet tujuan mulia, seperti mengentaskan rakyat miskin, mengubah wajah fisik desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memberikan layanan social desa, hingga memperdayakan masyarakat dan membuat pemerintahan desa lebih modern, karena pada kenyataannya desa sekedar dijadikan obyek pembangunan, yang keuntungannya direguk oleh actor yang melaksanakan pembangunan di desa tersebut : bisa elite kabupaten, provinsi, bahkan pusat.

b. Ciri-ciri Masyarakat desa (karakteristik)

1. Afektifitas adalah hubungan dengan perasaan kasih sayang, cinta , kesetiaan dan kemesraan. Perwujudannya dalam sikap dan perbuatan tolong menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita orang lain dan menolongnya tanpa pamrih.
2. Orientasi kolektif sifat ini merupakan konsekuensi dari Afektifitas, yaitu mereka mementingkan kebersamaan , tidak suka menonjolkan diri, tidak suka akan orang yang berbeda pendapat, intinya semua harus memperlihatkan keseragaman persamaan.
3. Partikularisme pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Perasaan subyektif, perasaan kebersamaan sesungguhnya yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja.
4. Askripsi yaitu berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau keturunan.
5. Kekabaran adalah sesuatu yang tidak jelas terutama dalam hubungan antara

pribadi tanpa ketegasan yang dinyatakan eksplisit. Masyarakat desa menggunakan bahasa tidak langsung, untuk menunjukkan sesuatu.

b) Masyarakat Perkotaan

a. Pengertian Kota

Masyarakat kota merupakan penduduk yang mendiami suatu wilayah dengan pola kehidupan yang berbeda dengan masyarakat desa. Kegiatan ekonomi yang dijalankan lebih mengarah ke jasa dan perdagangan, selain itu pola komunikasi dan interaksi lebih bersifat individual dan mengedepankan produktif dalam kegiatan ekonomi.

b. Ciri-ciri masyarakat Perkotaan

Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat perkotaan, yaitu :

1. Kehidupan keagamaannya berkurang, kadangkala tidak terlalu dipikirkan karena memang kehidupan yang cenderung kearah keduniaan saja.
2. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus berdantung pada orang lain (Individualisme).
3. Pembagian kerja diantara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata.
4. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota.
5. Jalan kehidupan yang cepat dikota-kota, mengakibatkan pentingnya faktor waktu bagi warga kota, sehingga pembagian waktu yang teliti sangat penting, intuk dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu.
6. Perubahan-perubahan tampak nyata dikota-kota, sebab kota-kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar.

c) Perbedaan antara desa dan kota

Perbedaan antara masyarakat desa dan masyarakat kota yang masing-masing punya karakteristik tersendiri. Perbedaan ciri antara lain :

Tabel 2.1

Perbedaan Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan

Masyarakat Pedesaan	Masyarakat Kota
Perilaku homogeny	Perilaku heterogen
Perilaku yang dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan kebersamaan	Perilaku yang dilandasi oleh konsep pengendalian diri dan kelembagaan
Perilaku yang berorientasi pada tradisi dan status	Perilaku yang berorientasi pada rasionalitas dan fungsi
Isolasi sosial, sehingga statik	Mobilitas sosial, sehingga dinamik
Kesatuan dan keutuhan kultural	Kebauran dan diversifikasi kultural
Banyak ritual dan nilai-nilai sakral	Birokrasi fungsional dan nilai-nilai sekular
Kolektivisme	Individualisme

Sumber: Data Primer Diolah, 2018⁶⁵

Masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian, walaupun terlihat adanya tukang kayu, tukang genteng dan bata, tukang membuat gula, akan tetapi inti pekerjaan penduduk adalah pertanian. Pekerjaan-pekerjaan di samping pertanian, hanya merupakan pekerjaan sambilan saja⁷. Golongan orang-orang tua pada masyarakat pedesaan umumnya memegang peranan penting. Orang akan selalu meminta nasihat kepada mereka apabila ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi.

Ciri yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk membedakan

⁶⁵ <https://wayankrish.blogspot.com>, diakses tanggal 08 Oktober 2019, pukul 11.04 WIB

antara desa dan kota. Dengan melihat perbedaan-perbedaan yang ada mudah-mudahan akan dapat mengurangi kesulitan dalam menentukan apakah suatu masyarakat dapat disebut sebagai masyarakat pedesaan atau masyarakat perkotaan.

Ciri-ciri tersebut antara lain :

- 1) Jumlah Dan Kepadatan Penduduk
- 2) Lingkungan Hidup
- 3) Mata Pencaharian
- 4) Corak Kehidupan Sosial
- 5) Stratifikasi Sosial
- 6) Mobilitas Sosial
- 7) Pola Interaksi Sosial
- 8) Solidaritas Sosial
- 9) Kedudukan Dalam Hierarki Sistem Administrasi Nasional

d) Hubungan Pedesaan Dengan Perkotaan.

Masyarakat pedesaan dan perkotaan bukanlah dua komunitas yang terpisah sama sekali satu sama lain. Bahkan dalam keadaan yang wajar diantara keduanya terdapat hubungan yang erat. Bersifat ketergantungan, karena diantara mereka saling membutuhkan. Kota tergantung pada dalam memenuhi kebutuhan warganya akan bahan-bahan pangan seperti beras, sayur-mayur, daging dan ikan.

Desa juga merupakan sumber tenaga kasar bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu di kota, misalnya saja buruh bangunan dalam proyek-proyek perumahan. Proyek pembangunan atau perbaikan jalan raya atau jembatan dan tukang becak. Mereka ini biasanya adalah pekerja-pekerja musiman. Pada saat musim tanam mereka sibuk bekerja di sawah. Bila pekerjaan dibidang

pertanian mulai menyusut, sementara menunggu masa panen mereka merantau ke kota terdekat untuk melakukan pekerjaan apa saja yang tersedia. Hubungan kota-desa cenderung terjadi secara alami yaitu yang kuat akan menang, karena itu dalam hubungan desa-kota, makin besar suatu kota makin berpengaruh dan **makin menentukan kehidupan perdesaan.**⁶⁶

⁶⁶ Rr. Tjahjani Busono, MS Barliana, dan Johar Maknun, *Perubahan Sosial di Desa Asal Migran Tenaga Kerja Wanita*, Hal. 2-3.

h. Kemandirian

Istilah “kemandirian” berasal dari kata dasar “diri” yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, kemudian membentuk satu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata “diri”, maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers disebut dengan istilah *self*, karena diri itu merupakan inti dari kemandirian.⁶⁷

Kemandirian menunjukkan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang lain. Individu yang mandiri sebagai individu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya. Menurut beberapa ahli “kemandirian” menunjukkan pada kemampuan psikososial yang mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung dengan kemampuan orang lain, tidak terpengaruh lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhannya sendiri.⁶⁸

a. Ciri-ciri kemandirian

Kemandirian secara psikososial tersusun dari tiga aspek yaitu sebagai berikut :

1. Mandiri emosi adalah aspek kemandirian yang berhubungan dengan perubahan pendekatan atau keterkaitan hubungan emosional individu, terutama sekali dengan orang tua atau orang dewasa lainnya yang banyak melakukan interaksi dengan dirinya.
2. Mandiri bertindak adalah kemampuan untuk membuat keputusan secara bebas, menindaklanjuti, serta bertanggung jawab.
3. Mandiri berfikir adalah kebebasan memaknai seperangkat prinsip tentang benar-salah, baik-buruk, dan apa yang berguna bagi dirinya.

⁶⁷ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 185.

⁶⁸ Eti Nurhayati, *Psikologi Pendidikan Inovatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 131.

- b. Ciri-ciri kemandirian yang Pertama, kemandirian emosional.

Hubungan anatar anak dan orang tua berubah dengan sangat cepat, lebihlembih setelah anak memasuki usia remaja. Seiring dengan semakin mandirinya anak dalam mengurus dirinya sendiri pada pertengahan masa kanak-kanak, maka perhatian orang tua dan orang dewasa lainnya terhadap anak semakin berkurang.

- c. Kedua, kemandirian bertindak. Mandiri dalam bertindak berarti bebas untuk bertindak sendiri tanpa terlalu bergantung pada bimbingan orang lain. Kemandirian bertindak, khususnya kemampuan mandiri secara fisik sebenarnya sudah dimulai sejak usia anak dan meningkat dengan tajam sepanjang usia beranjak remaja. Peningkatan itu bahkan lebih dramatis daripada peningkatan kemandirian emosional.
- d. Ketiga, kemandirian berfikir, kemandirian berfikir merupakan proses yang paling kompleks, tidak jelas bagaiman proses berlangsung dan pencapaiannya terjadi melalui proses internalisasi yang pada lazimnya tidak disadari. Ciri kemandirian mandiri dalam berfikir ditandai dengan cara berfikir semakin abstrak, keyakinan yang dimiliki berbasis ideologis, keyakinan-keyakinan semakin mendasar pada nilai-nilai mereka sendiri bukan hanya nilai yang ditanamkan oleh orang tua.⁶⁹

Teori pembangunan mengatakan bahwa sesungguhnya pembangunan merupakan sebuah upaya yang dapat membawa masyarakat mengikuti sebuah proses untuk mencapai kehidupan yang sebelumnya dianggap tidak baik,atupun kurang baik, menjadi sebuah kondisi yang lebih baik. Meskipun demikian kondisi masyarakat yang lebih baik adalah sebuah kondisi yang tidak dapat ditunggalkan.

Kondisi ini mempunyai banyak ukuran dan kriteria yang berbeda. Akibatnya, ukuran kondisi yang lebih baik bagi seseorang belum tentu baik menurut orang lain, bahkan dapat saja menajdi kondisi yang lebih buruk, contohnya Pemerintah beranggapan kondisi yang

⁶⁹ Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 57.

lebih baik bagi bangsanya adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berusaha membuka sebanyak mungkin wilayah kantong-kantong pertumbuhan ekonomi yang dapat mendukung tujuan tersebut. Oleh karena itu, agar kinerja administrator publik dapat betul-betul mengarah pada pencapaian upaya perbaikan kehidupan masyarakatnya, maka teori-teori pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan manusia dari beragam sudut pandang perlu tersedia.⁷⁰

Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Terkait dengan program pembangunan, bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri.

⁷⁰ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan)*, Edisi I, (Yogyakarta: UPP AMP YKIN, 1997), 116.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Desti Saputri, yang bertujuan meneliti tentang analisis dampak pembangunan infrastruktur jalan terhadap usaha dan kesejahteraan masyarakat bantaran sungai Ngrowo. Metode yang digunakan adalah metodologi kualitatif.

Hasil penelitian tersebut adalah dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jalan mampu menaikkan pertumbuhan usaha ekonomi rakyat sekitar bantaran Sungai Ngrowo di Desa Pangungrejo, Kutoanyar, dan Tretak di Kabupaten Tulungagung. Infrastruktur berguna untuk memudahkan mobilitas faktor produksi, terutama penduduk, memperlancar mobilitas barang/jasa, dan memperlancar perdagangan antar daerah.

Adanya suatu pembangunan jalan menjadi suatu kebutuhan vital sebagai alat pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi, hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah, dengan pendapatan perkapita masyarakat dan berkurangnya pengangguran.

Penelitian tentang Pinggir Kali Ngrowo *Water Front* pernah dilakukan oleh Rofi'i dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan adalah untuk memperoleh gambaran tentang penataan pembangunan Pinggir Kali Ngrowo *Water Front* dan mengetahui dampak perekonomian dari pembangunan yang dilakukan. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dan memperoleh hasil bahwa kajian Pra Desain Rencana Penataan kawasan

ini nantinya dapat dihasilkan suatu gambaran tentang penataan lay out dan rancangan desain kawasan wisata yang sesuai dalam Pra Desain Rencana Penataan Kawasan Wisata Pinggir Kali Ngrowo Water Front Tulungagung yang sesuai dengan lingkungan sekitar.

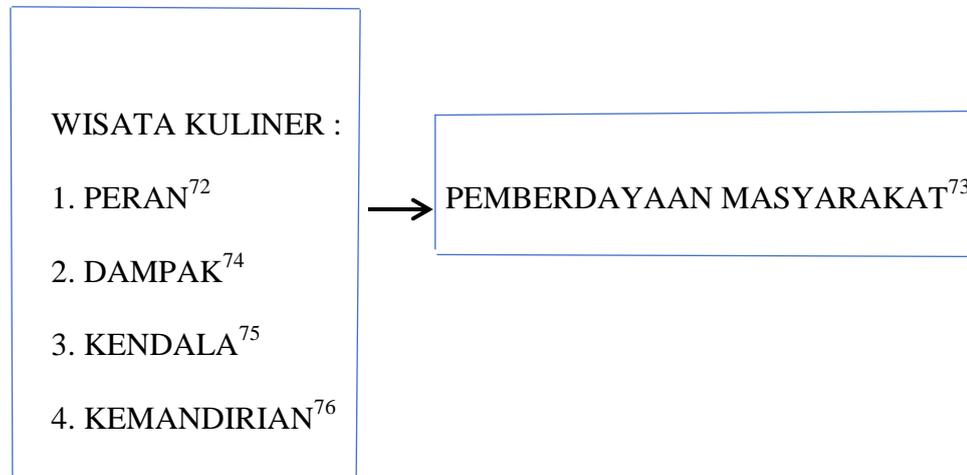
Penelitian tentang pemanfaatan kios wisata kuliner Pinggir Kali Ngrowo *Water Front* pernah dilakukan oleh Fitria dari Universitas Jember dengan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan adalah untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pedagang dalam pemanfaatan kios di wisata kuliner Ngrowo *water front* yang telah dibangun pemerintah. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung bagi pedagang dalam melakukan pemanfaatan kios di Wisata Kuliner Pinggir Kali Ngrowo *water front*.⁷¹

⁷¹ Elva Fitria, “*Faktor pendukung dan Faktor penghambat pedagang dalam pemanfaatan kios wisata kuliner Ngrowo Water Front*”, September 2017, hal. 7.

C. Kerangka Berfikir

Skema 2.1

Kerangka Berfikir



Sumber: Data Primer Diolah, 2019

⁷² Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.215

⁷³ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*; dalam *Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012, h. 1

⁷⁴ Gunawarman Suratmo, *Analisis Mengenasi Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hal.2.

⁷⁵ Muh Rosihuddin, "Pengertian Problematika Pembelajaran", dalam <http://banjirembun.blogspot.com/2012/11/pengertian-problematika-pembelajaran.html> (28 April 2015)

⁷⁶ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 185.